

Resistensi Sosial atas Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang

Muhammad Wahyu Prasetyo Adi^{1*}, Muhtar Habbodin², Muhammad Lukman Hakim³

*Corresponding Author: mwahyuprasetyo1608@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Brawijaya

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i2.38412

Abstract

This study aims to describe social resistance to the practice of money politics in the election of the head of Karanganyar village, Malang Regency. So far, the existence of resistance to the practice of money politics has been very varied, through political education, community empowerment to reporting suspected bribers to the authorities. Unlike previous literature, this study examines the restructuring of resistance from motives, underground networks to the surface. This study uses a descriptive qualitative method because it wants to examine, examine, describe and analyze the struggle of residents who are purely resistant in the election of the head of Karanganyar village, Poncokusumo sub-district, Malang Regency in 2023. By using Scoot's theory of resistance as the main analytical tool, this study produces findings that there are two forms of resistance from Karanganyar residents to money politics, namely open resistance and closed resistance. Open resistance is seen from the existence of public political education, the installation of banners and guarding posts. While closed resistance can be seen from individual rejection, to house-to-house education. This finding then updates previous massive research on political education, both through community leaders and through official institutions in stimulating resistance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan resistensi sosial atas praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Karanganyar, Kabupaten Malang. Sejauh ini eksistensi resistensi terhadap praktik politik uang sangat variatif, melalui pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat hingga pelaporan terduga penyuap kepada pihak berwajib. Berbeda dengan literatur-literatur terdahulu, kajian ini mengupas restrukturisasi resistensi dari motif, jaringan bawah tanah hingga menuju permukaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena ingin mengupas, menelaah, mendeskripsikan hingga menganalisis perjuangan dari warga yang resisten secara murni dalam perhelatan pemilihan kepala desa Karanganyar kecamatan poncokusumo kabupaten malang tahun 2023. Dengan menggunakan teori Scoot tentang resistensi sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat dua bentuk resistensi warga Karanganyar terhadap politik uang yaitu resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Resistensi terbuka tampak dari adanya edukasi politik secara publik, pemasangan banner dan penjagaan pos. Sedangkan resistensi tertutup dapat dilihat dari penolakan individual, hingga edukasi dari rumah ke rumah. Temuan ini lantas memperbarui penelitian sebelumnya yang massif terhadap pendidikan politik, baik melalui tokoh masyarakat maupun melalui lembaga resmi dalam menstimulasi resistensi.

Keywords

Kabupaten Malang, Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa, Politik Uang, Resistensi Sosial

Article History

Received December, 19
Revised December, 27
Accepted December, 28
Published December, 30

Corresponding Author

Muhammad Wahyu Prasetyo
Adi, Universitas Brawijaya.
Jl.Veteran Malang, Jawa Timur,
65145.

Pendahuluan

Resistensi sosial terhadap praktik politik uang bukan lagi sebagai informasi baru dalam tatanan kepemiluan maupun pilkades. Mustika (2023) menyinggung bahwa resistensi terhadap dominasi uang merupakan reduksi atas generalisasi abnormalitas dalam demokrasi. Resistensi sosial diekspresikan oleh warga Desa Karanganyar Kabupaten Malang pada pemilihan kepala desa tahun 2023. Motif ini akibat pilihan warga desa secara murni untuk dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan praktik politik uang dan keinginan perubahan yang lebih dalam mengembangkan kondisi desa. Konsekuensi ini dipilih akibat pertimbangan rasional, bahwa dari tiga calon kandidat yang berkontribusi pada pesta demokrasi desa, dua diantaranya melakukan praktik politik uang dan satu kandidat lain tidak melakukan praktik politik uang. Hematnya, bahwa politik uang merujuk pada tindakan hegemoni dalam merawat hubungan sosial atas sebuah tradisi lama dari kegiatan lima tahunan, yang saat ini berubah menjadi delapan tahun sekali dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024. Gejala yang memicu resistensi terhadap dominasi uang akibat serangan kapital dari dua kandidat resmi, tertuang melalui serangkaian wujud matang. Bahwa konstruksi resistensi dimassifkan demi mencapai sebuah kemenangan perlawanan.

Interpretasi terhadap pemaknaan resistensi terkadang menimbulkan pemahaman ganda, sebagai bentuk penegasan dari akhir hingga awal. Tulisan ini merujuk pengertian James C. Scott dalam bukunya *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, bahwa resistensi merupakan semua tindakan oleh anggota kelas dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (Scott, 2000). Hematnya resistensi mampu dilakukan secara individual yang sifatnya tertutup atau kolektif yang sifatnya terbuka dan tidak menutup kemungkinan terjadi kolaborasi atas dua sifat tersebut. Sekaligus sebagai pisau analisis dari apa yang disampaikan Scott dalam penelitiannya, bahwa resistensi terbagi menjadi dua klasifikasi. Pertama terkait resistensi terbuka (*public transkrip*) yang memiliki sifat kolektif, terstruktur, cenderung sistematis dan berkonsekuensi revolusioner. Kedua terkait resistensi tertutup (*hidden transkrip*) yang memiliki sifat individual, tidak beritme hingga tidak berkonsekuensi revolusioner, penerjemahan dari resistensi tertutup biasa terafiliasi pada perlawanan sehari-hari oleh kelompok petani atas pelanggaran moral yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, begitu pula resistensi terbuka (Scott, 2000).

Berbagai literatur terdahulu terkait resistensi terhadap dominasi uang telah terwujud dalam berbagai bentuk seperti menolak uang tetapi memilih sesuai pilihan (Astuti & Marlina, 2022; Muhtadi, 2013), menolak uang dengan memilih partai yang tidak menawarkan uang (Muhtadi, 2013; Mustika et al., 2023), tidak memilih kandidat (Mustika et al., 2023), menyediakan posko pengaduan (Pahlevi & Amrullobbi, 2020) serta perihal penebaran doktrin edukasi untuk melakukan resistensi melalui peran Kyai dan Da'i (Hajad, 2015; Fahriansyah, 2015), hingga internalisasi pendidikan politik melalui jaringan kelembagaan dan organisasi sipil (Alina, 2022; Hafrida et al., 2022; Marsudi & Sunarso, 2019; Moch Edward Trias Pahlevi, 2020; Riwanto et al., 2021; Taufik et al., 2017; Wahyuni et al., 2023; Zainal et al., 2021). Lebih jauh bahwa kajian resistensi begitu penting, fragmentasi resistensi telah lama disinggung dalam atmosfer penelitian seperti Kartodirdjo (1984) yang mengupas pemberontakan petani Banten, lalu penelitian oleh (Lucas, 1985) mengupas tentang peristiwa tiga daerah dalam melakukan pemberontakan, kemudian penelitian oleh (Harper, 1968) yang membedah perlawanan kasta rendah di India melalui serangkaian aksi pasif yang tidak dapat dikalahkan, dan (Paige, 1988) terkait revolusi kelas agraria dalam mengubah sistem distribusi sumber daya, hak kepemilikan lahan hingga struktur ekonomi yang lebih luas.

Sebagaimana orientasi substansi penelitian ini berkiblat pada resistensi terhadap praktik politik uang di Desa Karanganyar Kabupaten Malang tahun 2023. Fenomena ini cenderung unik ditengah generalisasi uang sebagai hal yang normal dalam meraih dukungan dan kemenangan

politis (Abdurrohman, 2021; Lestari & Sunarso, 2021; Putra, 2018). Tantangan lain bahwa politik uang telah mengakar menjadi sebuah tradisi (Astuti & Marlina, 2022; Putri et al., 2020), bahkan tertuang dalam bentuk tindakan atau perilaku elektoral (Ramadhan et al., 2019; Ridhuan, 2023). Harapan besar dalam level pemilihan mampu mengimplementasikan asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang secara prosedural mengatur tindakan yang seharusnya dilakukan kandidat maupun pemilih (Shadrina & Wijaya, 2024), hingga menciptakan konsepsi *das sollen* dalam berdemokrasi (Basri & Si, 2020). Dan tentunya mampu menuangkan secara murni atas makna dan hakikat dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang larangan penggunaan politik uang pada pemilihan umum.

Sebagai bentuk kebaruan terhadap penelitian, studi resistensi pada Desa Karanganyar oleh warga yang resisten belum dilakukan apalagi melalui kacamata Resistensi cara pandang James C. Scott. Hal ini untuk menjustifikasi bahwa hakikat dalam maksud penelitian, karena cakupan dalam resistensi milik Scott terbangun melalui dua klasifikasi besar, melalui resistensi terbuka dan resistensi tertutup atau dalam komposisi moral ekonomi petani disebut perlawanan sehari-hari (Scott, 1993). Pembaruan terhadap konstruksi resistensi sangat dibutuhkan, secara relevan mendukung pengayaan konsep resistensi milik James C. Scott (1993) sekaligus sebagai komposisi dalam menegakkan demokrasi substansi dalam tataran teknis. Hakikat resistensi tak lain perlawanan struktural, baik dilakukan individu maupun kolektif. Scott (2000) dalam bukunya *senjatanya orang-orang kalah* memfokuskan dominasi petani pemilik tanah dengan penggarap tanah (buruh), bahwa pelanggaran moral menyertai antara dua kelas ini. Sehingga resistensi penggarap tanah hanya mampu dituangkan secara diam-diam meskipun opsi secara terbuka tidak dibatasi.

Secara khusus, pelanggaran moral dalam penelitian ini diterjemahkan pada penyimpangan praktik politik uang yang secara tradisi menjadi alat dominasi sebagaimana pemilik lahan pertanian yang tidak memperhatikan kaidah moral. Relevansi resistensi terhadap dominasi uang dalam pilkades tidak menutup ruang ekspresional atas kegiatan yang sarat akan penyimpangan. Sebagaimana pada tahun 2023, warga desa Karanganyar telah melaksanakan pemilihan dalam menentukan kepala desa. Tetapi dari tiga kandidat, dua diantaranya terindikasi melakukan praktik politik uang. Satu kandidat tidak melakukan dan mencoba melakukan perlawanan bersama warga yang memiliki pemahaman sejalan. Motif lain, akibat tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan politik uang menjadi keniscayaan. Pemberhentian siklus yang cenderung berkepanjangan menjelang pemilihan pemimpin ini mampu menghasilkan kemenangan politis bagi kandidat yang tidak menggunakan politik uang. Keunikan ini lantas membenarkan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil bahwa jaringan warga yang resisten mampu membawa awal dari sebuah perubahan dalam dinamika desa.

Melihat geneologis dari komposisi demokrasi, pilkades merupakan bentuk representasi masyarakat desa dalam menentukan pemimpinnya, bahkan lebih jauh dari demokrasi Indonesia dibentuk (Astuti & Marlina, 2022; Widjaja, 2008). Pemerintahan desa sebagai pemilik otonomi asli telah lama kehilangan marwah sejati setelah pendudukan orde baru akibat penyeragaman kebijakan oleh UU No 5 tahun 1979, namun marwah itu kembali terekonstruksi ulang oleh UU No 6 tahun 2014 tentang pengakuan sebagai pemilik otonomi asli (Astuti & Marlina, 2022). Melalui kemampuan kolektif beberapa warga desa yang berpihak pada melawan uang, restrukturisasi marwah otonomi desa direset ulang melalui pemilihan kepala desa. Muhtadi (2013) menyebutkan bahwa kondisi politik saat ini merupakan akibat warisan politik sentral yang meniscayakan praktik politik uang. Hal ini terlalu jauh dari marwah sebuah desa yang memiliki otonomi asli, sehingga relokasi perilaku penyimpangan hanya mampu dihadapi dengan malampaui warisan politik sentral dengan tindakan resistensi untuk mewujudkan siklus otonomi desa. Tegasnya, politik uang sebagai

antitesis dari penyelenggaraan pemilihan yang menggerogoti etika, norma dan siklus pemilihan yang ideal.

Resistensi oleh warga desa Karanganyar dalam pemilihan kepala desa Karanganyar tahun 2023 menjadi tindakan perdana setelah kemampuan dan kemauan dalam menerjemahkan kaidah etika hingga moral pemilihan sesungguhnya. Pertalian ini bahkan berhubungan dengan siklus memperjuangkan hakikat demokrasi substansi yang original. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana wujud dari resistensi terhadap praktik politik uang oleh warga desa Karanganyar melalui pisau analisis James C. Scott, *kedua* apa dampak atas resistensi terhadap praktik politik uang oleh warga desa Karanganyar setelah tindakan tersebut dilakukan. Maksud dari permasalahan ini untuk mengungkapkan lebih mendalam melalui pengayaan teori resistensi. Karena teori resistensi hanya memberikan analisa terhadap bidang pertanian ditengah transisi penggunaan alat modern dalam mengeksploitasi buruh tani hingga ekologi. Sehingga penerjemahan resistensi lebih luas pada kajian-kajian sosial yang relevan meniscayakan manfaat praktis dan teoritis, baik bagi warga masyarakat secara umum saat menjelang pemilihan hingga pembaruan pengetahuan dalam konteks resistensi secara fragmentatif.

Relokasi teori saat dalam kajian politik uang atas milik Scott oleh warga desa Karanganyar telah memberikan perhatian besar untuk dikaji. Resistensi yang notabeneanya sangat sulit dilakukan apalagi bagi warga desa yang cenderung bergerak secara inisiatif tanpa adanya dorongan dari instansi terkait. Kondisi ini tidak hanya memperbarui kondisi normalisasi uang ditengah setiap pemilihan. Namun juga mengindikasikan pergeseran perilaku untuk lebih cerdas dalam menentukan pemimpin delapan tahun mendatang melalui visi-misi dan program. Konsekuensi ini menciptakan demokrasi desa yang utopia, bahwa keselarasan antara serapan publik dengan politik menjadi lebih mudah terserap tanpa adanya beban politik kandidat. Representasi ini juga menjadi bagian parsial bahwa warga desa mampu menggulingkan tindakan penyimpangan, meskipun terbatas pada pemberitaan hingga bagaimana untuk menyalurkan konstruksi resistensi yang ideal

Resistensi Sosial

Teori resistensi merupakan produk dari James C. Scott dalam risetnya yang beroperasi pada masyarakat petani di Asia Tenggara. Dalam bukunya berjudul *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah* kalimat resistensi berawal dari *resistance* yang berarti perlawanan (Scott, 2000). Penerjemahan lebih dalam yang disampaikan oleh Scott tertuang dalam bukunya *Perlawanan Kaum Tani*, bahwa perlawanan memiliki makna sesuatu yang terbentuk oleh berbagai yang bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu (Scott, 1993). Lebih lanjut, pernyataan Scott atas resistensi sebagaimana berikut:

Perlawanan (resistence) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, peng-hormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang). atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini (Scott, 1993).

Tiga definisi singkat yang tertuang tersebut memberikan makna, pertama bahwa perlawanan tidak harus mengambil bentuk aksi bersama atau protes terbuka. Kedua bahwa banyak aksi yang dimaksudkan mampu menghasilkan aksi protes atau pemberontakan dan membawakan akibat-akibat yang sama sekali tak diperhitungkan sebelumnya. Fokus perlawanan lebih berorientasi pada basis materi hubungan antar-kelas dan pertarungan antar kelas, baik berupa

perlawanan secara kolektif maupun individual. Bentuk perlawanan dimaksudkan untuk menantang dominasi dan menentang berbagai standar keadilan dan kewajaran, yang pada akhirnya berfokus pada maksud daripada konsekuensi, sehingga sebuah kewajaran ketika perlawanan tidak mencapai hasil yang dimaksudkan (Scott, 2000).

Resistensi dalam struktur sosial biasa dipahami sebagai bentuk kontradiksi, artinya suatu konflik nilai disamping konflik kepentingan. Bahwa didalam setiap "need" terdapat pengaruh, atau "want" yang sedang dalam keadaan menjadi "ought" (kepatuhan) dan demikian pula sebaliknya, bahwa dalam pada itu setiap perjuang kelas adalah perjuangan nilai (Scott, 2000). Atas uraian tersebut, bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok minoritas pada umumnya atau kelas tertindas sering kali melahirkan tindakan pemberontakan. Tindakan pemberontakan menjadi ruang dari implementasi pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianggap menyimpang atas kepentingan komunal, dengan demikian tujuan utama dari adanya perlawanan yaitu perubahan sosial (Ferhi F. Putra, 2008).

Namun bukan berarti bahwa istilah perlawanan hanya berhenti pada kalimat pemberontakan atau tindakan revolusioner. Perlawanan dapat terjadi dalam beberapa cara yang berbeda-beda, beberapa terdiri dari kekuatan politik yang besar atau yang kecil dan yang lainnya tidak mengandung kekuatan politik sama sekali. Perlawanan dapat terjadi secara pasif (ketika seseorang tidak bertindak melawan kekuatan yang menindas mereka) atau secara aktif (ketika yang berkuasa menerima pembalasan dari pihak yang ditunduk-kan). Perlawanan juga dapat terjadi secara terasing (bersifat individual) ataupun terartikulasi (kekuatan kolektif). Perlawanan pasif tidak mengandung kekuatan politik, sementara perlawanan yang terasing mengandung kekuatan sosial yang kecil (Ferhi F. Putra, 2008). Dalam klasifikasinya, resistensi terbagi menjadi dua wujud penting, yaitu resistensi terbuka dan tertutup.

Resistensi terbuka merupakan bentuk yang disebut oleh Scoot (1997) dalam bukunya berjudul "*Perlawanan Kaum Tani*". Scoot menyinggung bahwa perlawanan secara terbuka dalam hampir semua keadaan akan memancing suatu respon yang lebih cepat dan lebih kejam ketimbang suatu ketidakpatuhan yang mungkin tidak demikian meluas, akan tetapi tidak pernah membantah definisi formal hierarki dan kekuasaan. Bagi mayoritas kelas bawah, sudah pasti bahwa dalam sejarah nyatanya sedikit sekali prospeknya untuk memperbaiki status mereka maka bentuk perlawanan ini adalah pilihan satu-satunya dan perlawanan terbuka dianggap sebagai perbuatan nekat (Scott, 2000). Selain itu, Scoot (1993) membagi beberapa sifat dari perlawanan terbuka *public transkrip*. Sifat yang disebut oleh Scoot yaitu dapat dipahami sebagai berikut, 1) terorganisasi, sistematis dan kooperatif, 2) Berprinsip atau tanpa pamrih, 3) Mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/atau 4) Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri.

Sedangkan Resistensi Tertutup merupakan model sifat kedua yang sebagai resistensi tertutup. Perlawanan tertutup merupakan perlawanan yang dilakukan tanpa melakukan tindakan secara indrawi. Artinya tindakan biasa disebut perlawanan simbolis atau ideologi (misalnya gosip, finah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perlawanan dari kelas (Scoot, 1993). *Hidden transkrip* dilakukan karena nasib dari kelompok tertindas sebagaimana kasus Scoot (2000) yang diangkat. Ketika petani melakukan perlawanan nasibnya hampir selalu kalah, maka pemberontakan yang besar sama sekali tidak taktis untuk mencapai suatu hasil yang lestari. Pertarungan yang sabar dan diam-diam yang dilakukan dengan tekad yang kuat oleh masyarakat-masyarakat desa selama bertahun-tahun akan lebih banyak mendatangkan hasil daripada percikan-percikan gelora seketika itu dan perlawanan ini tidak dapat dikalahkan (Scott, 2000). Resistensi tertutup memiliki beberapa

sifat-sifat tertentu, diantaranya 1) Tidak terorganisasi, tidak sistematis dan individual, 2) Bersifat untung-untungan dan ‘berpamrih’ (nafsu akan kemudahan), 3) Tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/atau 4) Dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian dengan kualitatif disebabkan karena adanya kecenderungan yang perlu dilakukan pembahasan secara faktual. Fenomena yang diangkat sangat logis ketika direpresentasikan dalam bentuk penjabaran dan penjelasan. Sugiyono (2007) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Informan penelitian ini dari lima warga desa dari setiap warga dusun dari desa Karanganyar dengan memperhatikan etika penelitian. Fokus penelitian dilaksanakan pada Resistensi sosial terhadap praktik politik uang pada pemilihan kepala desa Karanganyar kabupaten malang tahun 2023. Sumber data primer melalui wawancara terhadap warga yang melaksanakan resisten, sedangkan data sekunder melalui arsip, *log book*, hingga dokumen yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Temuan atas resistensi terhadap praktik politik uang oleh warga desa Karanganyar dalam pemilihan kepala desa terklasifikasikan menjadi dua. Aktualisasi ini terlaksana akibat keberanian warga dalam menindaklanjuti penyimpangan yang segera diberhentikan, diantara wujud tersebut yaitu dalam bentuk terbuka maupun tertutup.

Resistensi Terbuka

Resistensi terbuka menjadi temuan pertama oleh konsep Scott yang terpetakan dalam penelitian ini. Hal ini untuk menginformasikan secara terang-terangan bahwa resistensi sudah saatnya diwujudkan secara kolektif. Scott menekankan bahwa konsep resistensi terbuka memberikan orientasi terhadap orang-orang yang *resistance* untuk bertindak secara terorganisir dan bahkan berakibat revolusioner. Wujud ini kemudian terfragmentasi menjadi beberapa jenis yang terjadi dan dilakukan pada pemilihan kepala desa Karanganyar tahun 2023 melalui edukasi politik, pemasangan baner berisi penolakan terhadap politik uang, dan penjagaan pos.

Edukasi Politik

Edukasi politik merupakan representasi oleh warga yang resistensi terhadap praktik politik uang. Kegiatan edukasi ini terlaksana oleh warga yang resisten dengan keliling pada wilayah Desa Karanganyar bahwa politik uang hanya akan menimbulkan banyak konsekuensi. Melalui edukasi politik pada lima dusun didesa Karanganyar, edukasi politik menekankan konsekuensi rasional ketika memilih pemimpin yang menggunakan praktik politik uang, hematnya beberapa konsekuensi tersebut menjadi beberapa bagian yaitu Pertama berkaitan konsekuensi saat telah memilih pemimpin *money politik* hanya akan melahirkan program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan sehat, Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelayanan yang tidak memuaskan, peta komposisi yang dilaksanakan dalam menggerogoti sistem praktik politik uang akan melahirkan pelayanan yang jauh dari kata ideal. Kemudian ketiga yang menjadi komposisi resistensi atas konsekuensi praktik politik uang yaitu berkaitan pembengkakan pembiayaan dalam pelayanan.

”Kalau dengan adanya praktik politik uang, hal yang seharusnya gratis bisa menjadi berbayar, katakanlah seperti mengurus ktp, kk hingga akte kelahiran. Karena kalau misal dipimpin oleh pemimpin yang melakukan money politik maka mereka pasti memiliki beban moral. Bagaimana cara dia mengembalikan cost politik selama ini” (Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa komposisi ini akan menjadi tuangan matang dalam mengkombinasikan dalam resistensi praktik politik uang. Akibat lain yang dapat ditimbulkan hanya menyebabkan kondisi ini merugikan masyarakat itu sendiri saat melakukan kegiatan pelayanan, terkhusus pembengkakan biaya yang tidak seharusnya terjadi. Dalam mewartakan bahwa edukasi politik ini sangat penting dan esensial sebagai penompang utama ketika warga akan melakukan proses pemilihan, terkhusus menjelang penentuan siapa yang layak dipilih. Representasi ini sebagai wujud kemauan warga desa Karanganyar bahwa keberpihakan saat menjalankan makna demokrasi substansi menjadi kebutuhan parsial sebelum menuju hakikat substansial. Kantaprawira (2006) memberikan atensi dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, namun dalam karyanya lebih berpihak pada kalimat pendidikan politik daripada edukasi politik namun pada akhirnya dua terma tersebut adalah hal yang sama. Kaitan daripada edukasi politik dalam menerjemahkan konsekuensi atas pilihan elektoral desa membawa kemampuan kolektif terhadap promosi temporer. Lautan politis yang cenderung kompleks hingga membawa tidak memberikan terjemahan positif terhadap eksistensi uang, telah menciptakan masyarakat yang berdaya dan mampu dalam mengambil pilihan atas hasil edukasi politik (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Relevansi teori Scott atas eksistensi edukasi yang cenderung terbuka ini memberikan perhatian pada usaha petani dalam melawan dominasi alat pengolahan modern. Scott (2000) menegaskan dalam konteks melawan paradoks ekosistem politik, memerlukan kegotong-royongan terpaksa. Artinya bahwa disini gotong royong dalam masyarakat melawan dominasi uang yang cenderung menindas sekaligus menggeneralisasi sesuatu tabu untuk mampu dan terniscayakan. Perihal ini juga relevan atas penelitian oleh Peter Linebaugh (1976), bahwa masyarakat ekonomi kelas atas (kapital) yang terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam menghantar mereka untuk mencederai individual buruh, tindakan pencurian kayu yang menjadi jati diri bahwa hak alamiah mesti terlaksana untuk bertahan hidup, hematnya resistensi terhadap ekologi yang terlalu berlebihan dalam eksploitasi (Linebaugh, 1976).

Pemasangan Banner Tolak Politik Uang

Pemasangan banner adalah wujud konkrit atas resistensi yang dilakukan warga desa dalam menghadapi dominasi uang dalam kancah pemilihan kepala desa Karanganyar. Pada hakikatnya, banner merupakan bentuk penyampaian secara langsung dari kelompok resisten yang geram akan maraknya praktik politik uang. Produk resistensi ini sebagai perwakilan dalam merepresentasikan bahwa politik uang harus benar-benar ditolak dan dilawan dengan mengingatkan warga desa menjelang pemilihan dilangsungkan. Keputusan kolektif oleh warga yang resisten, bahwa melalui pemasangan banner memiliki keuntungan tersendiri sebagaimana pernyataan informan dibawah ini:

”Kalau tulisan menolak politik uang itu enaknya gak akan dicabut mas, maksudnya kan praktik politik uang itu nggak hanya berkaitan dilevel desa bahkan bisa dilevel diatasnya jadi lebih berkesinambungan untuk jangka panjang” (Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024)

Melalui kesempatan ini, warga yang melakukan resistensi cukup mengalami kondisi yang tenang akibat banner tidak akan dicomot atau diambil meskipun pemilihan sudah dilangsungkan. Hal ini juga memberikan informasi lanjutan bahwa praktik politik uang tidak hanya menjadi atensi pada saat pemilihan kepala desa melainkan mampu mengekspansi pada jenjang yang lebih luas seperti pada level legislatif pusat atau daerah hingga level eksekutif pusat maupun daerah. Selain itu, penerjemahan lain inheren dengan maksud menjustifikasi kandidat yang maju dengan bersih sekaligus mempertahankan nilai-nilai moral pemilihan. Hematnya ketersediaan kandidat yang jelas secara prosedural tidak melakukan kecurangan dan penyimpangan politik. Scott, (2000) melalui temuannya dalam senjatanya orang-orang yang kalah merepresentasikan bahwa relevansi dari tindakan kolektif dalam menciptakan perlawanan merupakan hasil dialog maksud jangka panjang dan tentunya ditujukan untuk menjatuhkan dominasi demi sebuah kedamaian dan kondusifitas melalui rangkaian yang terstruktur, sistematis serta terorganisir. Temuan ini sekaligus membantah persepsi (Almeida et al., 2016) bahwa perlawanan kolektif yang cenderung dilakukan sangat hati-hati dalam konteks ini tidak tertuang secara esensial dan substantif. Sehingga keniscayaan ini berbeda jika disandingkan dalam konteks resistensi kaum petani dengan kaum resisten dalam politik pedesaan.

Penjagaan Pos

Penjagaan pos mampu menjadi kategori dari resistensi terbuka karena ditujukan untuk mencegah adanya jual beli suara terutama saat menjelang pemilihan atau biasa disebut serangan fajar. Strategi ini lantas menjadi representasi konkrit bahwa penjagaan pos hanya mampu dilaksanakan pada dusun tertentu tidak seluruhnya. Hal ini sebagaimana pernyataan warga setempat:

Kami lakukan penjagaan pos di beberapa titik yang memang rawan terjadinya serangan fajar, dan memang mendapatkan hasil (Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024).

Penjagaan pos bukan lagi dikatakan sebagai alokasi yang sepele, melalui kegiatan ini menjadi representasi resistensi atas pemahaman warga terhadap praktik politik uang bukan lagi sesuatu yang dibenarkan. Melalui penjagaan pos maka kesempatan penyuap atau calo relatif gagal. Tentu akibatnya proses demokrasi yang telah lama tercederai sejak era orde baru runtuh yang diinisiasi sebagai kemunculan praktik politik uang mulai rontok dan terdegradasi dari sistem pemerintahan yang rendah terkhusus pada desa Karanganyar. Penjagaan pos juga menjadi ruang representatif berikutnya bahwa keinginan warga secara organik dan murni datang dalam satu tujuan. Tujuan yang menekankan untuk mencegah praktik politik terlaksana merupakan pandangan jangka panjang bahwa sejauh ini ketika praktik politik uang bermesraan dalam pesta demokrasi hanya menimbulkan sengatan tajam pada perkembangan desa.

Panoff (1970) memberikan pandangan bahwa corak Asia Tenggara memang sering memprioritaskan materi jangka pendek. Artinya bahwa melalui praktik politik uang, jangka dalam mengaktualisasikan hasil kesepakatan cenderung terukur pada waktu setelah serangan fajar terlaksana. Keniscayaan tersebut kemudian membawa produk baru warga desa yang resisten melalui pemanfaatan pos tertentu sebagai blokade uang menuju elektoral. Selain itu, Scott, (1993) melayangkan persoalan ini sebagai bentuk interaksi dua arah oleh kelompok elit dalam melakukan eksploitasi melalui dominasi materi, bahwa kelompok elit akan bergantung pada janji-janji samar demi mendapatkan sepotong suara elektoral.

Kritik Terhadap Resistensi Terbuka

Merujuk pada pisau analisis dalam memetakan tindakan resistensi pada penelitian ini. Teori Scott menjadi pertimbangan rasional demi mendukung upaya analisis yang maksimal. Dalam publikasi bukunya *perlawanan kaum tani*, Scott (1993) menyatakan bahwa sifat resistensi terbuka mampu menimbulkan revolusioner, artinya cenderung menghendaki perubahan secara mendasar atas pemaknaan awal dari pilkades. Ketika ketidak hati-hatian bukan menjadi indikator daripada tindakan kolektif, maka besar kemungkinan resistensi terhadap hegemoni dan dominasi merupakan keniscayaan, karena klaim dominasi uang yang semakin erat dan matang hanya akan menciptakan perlawanan. Sebagaimana Frank Parkin dalam bukunya *Class Inequality and Political Order* yang melangkah lebih jauh dan mengklaim bahwa jika kelas dominan berhasil menanamkan ideologi dominasi ke dalam pikiran orang, maka kelas berkuasa itu akan menemui jauh lebih banyak kemarahan dan perlawanan (Armstrong, 1973).

Selain itu, analisa lain dalam Disertasi Scott yang telah dibukukan dengan judul *Moral Ekonomi Petani* (Scott, 1981). Scott memulai bahwa resistensi yang terorganisir ini lebih dipengaruhi oleh faktor tekanan ekonomi. Awalnya akibat perubahan dalam distribusi tanah yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok (kapitalis besar), hal ini memprakarsai desakan ketidakadilan hingga memicu perlawanan. Hal ini juga diperparah melalui penguasa saat mengubah kebijakan yang dianggap tidak adil kepada petani dan merugikan mereka. Resistensi atas pandangan moral terhadap ketidakadilan tersebut memprakarsai sampai permukaan tanah, atau hematnya resistensi terbuka. Akumulasi penindasan jangka panjang yang orientasinya dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme dalam konteks sejarah terhubung secara simultan pada ketidakadilan jangka pendek maupun jangka panjang.

Sayangnya, jeratan dominasi ekonomi tidak hanya mengekspansi para petani, melainkan terinfiltrasi secara keruh pada kegiatan sosial yang berbau pada praktek dominasi dan hegemoni seperti pada puncak pemilihan kepala desa Karanganyar 2023. Moral ekonomi petani menyatakan bahwa petani dan kelompok masyarakat petani memiliki prinsip-prinsip keadilan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Sehingga konstruksi melawan sebuah sistem yang tidak adil yang memiliki komposisi cenderung feodal atau kapitalis telah mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya (Scott, 1981).

Pada akhirnya, kritik atas relevansi resistensi terhadap praktik politik uang hanya mampu terakomodir melalui kemampuan kolektif yang terstruktur bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban elektoral dapat teraktualisasi ketika masa-masa fundamental dari sebuah restrukturisasi sistem. Perombakan awal dengan mengencangkan tujuan kolektif dengan resistensi terbuka atau melakukan perlawanan yang memberikan kesempatan untuk merubah tatanan struktur yang tidak ideal, akan menjadi tolak ukur pada perhelatan pemilihan kepala desa atas kemenangan jaringan revolusioner memotong arus dominasi dan hegemoni uang.

Resistensi Tertutup

Resistensi tertutup merupakan klasifikasi berikutnya setelah resistensi terbuka. Melalui tindakan diam-diam, tidak terstruktur atau terorganisir, tidak terdengar hingga sifatnya individual. Resistensi tertutup tidak membuka kemungkinan terjadinya tindakan secara kolektif, sebagai perwujudan oleh warga desa Karanganyar dalam meniscayakan penolakan dan perlawanan, resistensi tertutup tampak dari adanya resistensi individual, edukasi politik secara *door to door*, hingga pemasangan pamflet.

Resistensi Individual

Resistensi tertutup yang termanifestasikan dalam mengelak praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Karanganyar tahun 2023 dilakukan secara individual oleh elektoral. Tindakan ini merupakan tindakan yang hanya dilakukan oleh warga yang resisten atas praktik politik uang akibat keputusan murni dan organik bahwa eksistensi politik uang memang selayaknya tidak dibenarkan dalam pemilihan. Kupasan lain bahwa seni individual inilah yang memprakarsai terjadinya tindakan kolektif akibat saling mengerti dan memahami. Sebagaimana pernyataan informan yang resisten dibawah ini ;

”Saya mikirnya kalau seperti ini otomatis gak bener mas, dilain sisi kami juga sudah dewasa bisa memilah mana yang baik mana yang buruk untuk desa” (Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024).

Lebih lanjut, temuan lain dari fragmentasi Penolakan individual dilakuakn oleh warga resisten sebagaimana pernyataan berikut ;

”Uangnya itulo ditaruh diatas meja, ya saya lihat itu uangnya tapi saya memang gak mau dan dikasihkan saya, tapi langsung saya taruh meja lagi saya tinggal pergi, memang saya gak mau mas seperti ini” (Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024).

Sebagaimana temuan tersebut Scott, (1993) memberikan atensi bahwa masalah atas perlawanan ini sekurang-kurangnya melibatkan sesuatu pengorbanan untuk jangka pendek bagi individu untuk keuntungan jangka panjang. Lebih tepatnya saat perlawanan melalui jaringan individual elektoral tujuan telah terpapang dengan jelas untuk pemilihan kepala desa ditahun 2023, namun pada hakikatnya, dampak dan keuntungan setelah terjadinya resistensi jelas untuk jangka panjang. Karena jenjang jabatan dari seorang kepala desa terbilang cukup lama, jika posisi kepemimpinan dipimpin oleh orang yang tepat maka eksistensi pemerintahan itu sendiri dapat sehat. Namun sebagaimana hakikat dari resistensi tertutup bahwa kecenderungan tidak mampu tercium dalam permukaan tanah memang dibenarkan, bahwa aroma publik tak mampu tervisualkan dalam bentuk perlawanan atau penolakan yang massif.

Edukasi Politik dari Rumah ke Rumah

Edukasi politik merupakan wujud dari bagaimana setiap warga yang resisten mewartakan kepada warga lain yang pada hakikatnya belum resisten. Pewartaan ini dilaksanakan untuk menyadarkan warga bahwa praktik politik uang yang telah terindikasi dalam pemilihan kepala desa Karanganyar merupakan tindakan tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun ruang kompetitif. Edukasi politik dalam konteks ini cenderung berbeda dalam segi pelaksanaan. Penerjemahan edukasi ini lebih fokus pada orang-orang tertentu. Alasan bahwa edukasi politik dari rumah ke rumah menjadi pilihan warga desa Karanganyar yang resisten karena pergerakan ini cukup strategis. Pergerakan ini bahkan dapat dikatakan sebagai pergerakan bawah tanah, bahwa menekan aroma sampai ke akar sehingga hanya golongan-golongan tertentu yang akan diberikan pemahaman untuk sebuah perihal yang fundamental. Resisten yang diorganisir ini-pun sifatnya tidak memihak harus mengalokasikan biaya yang mahal, bahkan jika menggunakan tindakan bawah tanah mampu menciptakan sebuah hasil yang memuaskan. Aroma informasi dipadatkan demi menciptakan sebuah gejala pada permukaan, pada akhirnya informasi inti terserap secara organik dan massif pada afiliasi yang ditentukan dan dipetakan.

Terdapat beberapa pembagian tertentu atas maksud dari orang-orang tertentu untuk diedukasi dari rumah ke rumah yaitu, pertama mengedukasi internal keluarga karena menyelamatkan keluarga dari praktik politik uang tidak lain sebagai bahan fundamental dalam menyokong pemilihan yang sehat. Meskipun terbilang skala sangat kecil namun keluarga dianggap sebagai elektoral berpengaruh dalam menentukan pemimpin. Kedua kerabat dekat, bahwa konsekuensi praktis ketika mengedukasi kerabat dekat maka akan mengedukasi keluarga masing-masing kerabat, artinya pertalian ini tidak akan terputus dalam maksud dan tujuan daripada resistensi itu sendiri. Ketiga tokoh masyarakat, keunikan dalam temuan penelitian ini merupakan hal paling vital, alasan dibalik ini tokoh masyarakat memiliki pengaruh cukup kuat dilingkungan desa. Berbeda dengan tokoh masyarakat dilingkungan kabupaten atau kota, eksistensi tokoh masyarakat desa cenderung lebih berpengaruh secara organik dalam meniscayakan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar. Aktor ini bukan merujuk pada ketua RT atau RW melainkan tokoh yang memang berpengaruh pada dusun didesa Karanganyar.

Pemasangan Pamflet

Penerjemahan lain dari wujud resistensi oleh warga desa yang resistensi dilakukan melalui pemasangan pamflet tolak politik uang. Resistensi yang dituangkan melalui pamflet menjadi komposisi berikutnya setelah melakukan pemasangan banner. Meskipun ukuran dari pamflet lebih kecil, pemasangan ini terlaksana lebih massif dibandingkan pemasangan banner. Sebagaimana pernyataan informan yaitu:

”Saya lakukan pemasangan pamflet mas, dan itu inisiatif saya sendiri. Itu saya lakukan di beberapa titik yang terbilang cukup panas, dan pemasangan itu kami lakukan dini hari jam satu”
(Wawancara dengan NN, Warga Desa Karanganyar, 6 November 2024).

Temuan ini relevan dengan sifat dari apa yang disebutkan Scott (2000), bahwa perlawanan ini cenderung perorangan bahkan jika terdiri dari kelompok relatif kecil, dan dengan tenang perlawanan dilakukan secara anonim atau malam hari. Melalui ukuran yang tidak begitu besar, pamflet memberikan justifikasi bagi warga desa untuk menolak politik uang dalam pemilihan kepala desa Karanganyar. Selain itu, keuntungan jika memasang tulisan penolakan terhadap praktik politik uang mampu terkondisikan hingga pemilihan, artinya tidak adanya pencopotan. Kesempatan yang pada hakikatnya hanya datang menjelang pemilihan, tidak menutup kemungkinan bahwa memungkinkan resistensi sejak dini. Scott dalam pandangan lain juga meniscayakan konstruksi ini, bahwa kehati-hatian dalam memproses sebuah tujuan besar merupakan kebutuhan fundamental. Timbulan konsekuensi saat ingin menaklukkan dominan diatas segala kekuasaannya, hanya membawa hukuman lebih kejam daripada sebelum terlaksana (Scott, 2000). Dengan menutup ruang konsekuensi yang menyebabkan agen-agen resisten tergerus dari dominasi kekuasaan uang, mematangkan niat secara individual dan bergerak tanpa memandang konsekuensi tetap memprioritaskan implikasi.

Kritik Terhadap Resistensi Tertutup

Meskipun kandungan yang terdapat pada resistensi tertutup bersifat tidak sistematis dan tidak terstruktur sebagaimana (Scott, 1993) petakan, eksistensi atas edukasi *door to door* atau dari rumah ke rumah cenderung tersistem secara individual. Sebuah relevansi terapan antara diranah pertanian yang disinggung oleh Scoot dengan ranah perpolitikan. Edukasi *door to door* dipahami sebagai memberikan pemahaman dengan sembunyi-sembunyi pada jenis yang telah terpetakan. Kondisi ini merupakan keniscayaan ketika politik desa cenderung panas akibat dominasi uang yang

telah terstruktur hingga membetuk perilaku pemilih. Menekan agar siklus pemahaman tidak mampu tercium pada permukaan, edukasi *door to door* lantas menjadi bagian dari tertutup yang artinya hanya untuk kalangan tertentu yang telah masuk dalam rencana warga yang resisten.

Selain itu temuan ini menjustifikasi bahwa resistensi tertutup dilaksanakan melalui penolakan individual yang cenderung tidak diketahui. Tindakan ini merupakan ekspresi murni dari elektoral terhadap praktik politik uang. Tujuan daripada penolakan individual tidak berangkat dari terjemahan secara kolektif, namun merupakan konsekuensi pemahaman individual selama menjabat sebagai elektoral. Penolakan individual ini juga terafiliasi pada konsep Scott yang bersifat tidak menimbulkan tindakan revolusioner. Pada akhirnya bahwa revolusioner membutuhkan komposisi elektoral yang cukup banyak, karena akibat dari revolusioner itu sendiri mampu menciptakan perubahan besar-besaran jika praktik kemunkaran masih menjadi kebudayaan (Suseno, 1986). Bukan bermaksud demikian, bahwa seni individual hanya sebatas desakan hati dalam merepresentasikan hal yang benar sesuai prosedural pemilihan.

Adanya resistensi ini menunjukkan bagaimana kuatnya hasil dominasi dan hegemoni materi yang berasal dari kelompok-kelompok kapital. Terangnya, bahwa ekonomi kapital yang memprakarsai sebuah kebudayaan diluar norma dan nilai demokrasi, membentuk *status quo* yang tidak mudah untuk digulingkan. Resistensi dalam bentuk penggodakan informasi dalam jaringan bawah tanah yang mengakar menembus puncak pemilihan merupakan hasil efek jangka pendek sekaligus jangka panjang oleh warga desa Karanganyar untuk sebuah maksud dan tujuan. Sebagaimana pada karya Scott dalam bukunya *Perlawanan Kaum Tani* bahwa hasil kekayaan yang membentuk ketidakadilan dan hanya terkonsentrasi pada jaringan kapital merespons pemberontakan. Konsekuensi ini merupakan konstruksi atas tata kelola yang manipulatif melalui sistem ekonomi yang ada dalam meningkatkan suplai sumber daya, yang pada akhirnya dimaksudkan pada serapan elektoral untuk memenuhi kebutuhan jaringan kapital.

Selain itu, dalam artikel yang digagas oleh Wiliam M. Reddy (1977) dengan judul *The textile trade and the language of the crowd of Rouen* berargumen bahwa jika tiadanya organisasi perilaku massa yang memungkinkan protes maka massa lalu menilai dan menggunakan spontanitas dengan kesadaran bahwa itulah alat protes paling sedikit biayanya dan paling efektif. Sehingga selama dominasi uang berakibat pada penguatan tradisi menyimpang dan jauh dari kata prosedural, maka individu menghindari perlawanan manapun selain perlawanan oleh perorangan, dengan tidak formal dan bertindak dalam gelap (Reddy, 1977). Pilihan ini bukan berakibat pada tujuan dan maksud, namun pemikiran praktis dari individu elektoral yang telah menjadi suatu kultural yang pada akhirnya dapat mengumpulkan massa tanpa perencanaan atau organisasi, apalagi kepemimpinan formal. Konsekuensi dari seni individual tidak langsung untuk menjatuhkan atau mengubah dari sebuah sistem politik uang yang telah mengakar. Namun bertahap untuk resistensi jangka panjang terhadap keberhasilan perseorangan.

Kesimpulan

Pada akhirnya tulisan ini membawa titik terang terhadap sebuah kesimpulan bahwa resistensi sosial terbagi dalam bentuk, yaitu terbuka dan tertutup. Resistensi terbuka merupakan perlawanan yang dilakukan secara terbuka, hematnya wujud ini mampu diketahui oleh warga, bersifat kolektif dan dilakukan secara sistematis. Dalam resistensi terbuka oleh warga desa Karanganyar atas praktik politik uang yang terjadi, diantaranya terbagi menjadi beberapa wujud konkrit yaitu edukasi politik, pemasangan banner tolak politik uang, dan penjagaan pos. Sedangkan resistensi tertutup tampak dari penolakan individual dan edukasi politik secara *door to door*.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami resistensi sosial terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, khususnya di Kabupaten Malang. Namun, beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek deskriptif terkait wujud resistensi sosial berdasarkan teori James C. Scott tanpa mengeksplorasi lebih dalam faktor struktural, seperti dinamika ekonomi, sosial, dan budaya, yang memengaruhi pola resistensi tersebut. Kedua, fokus penelitian terbatas pada satu desa, yakni Desa Karanganyar, sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda menjadi terbatas. Ketiga, penelitian ini kurang menggali lebih jauh tentang efektivitas dari berbagai bentuk resistensi, baik terbuka maupun tertutup, dalam mengurangi praktik politik uang secara signifikan dalam jangka panjang.

Untuk penelitian berikutnya, riset lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah penelitian ke desa-desa lain di Kabupaten Malang atau wilayah lain dengan karakteristik politik dan sosial yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi hubungan antara resistensi sosial dan perubahan kebijakan lokal yang lebih luas untuk menangkal praktik politik uang. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas setiap bentuk resistensi, baik terbuka maupun tertutup, dalam memengaruhi pola perilaku politik masyarakat dan hasil pemilihan dapat menjadi fokus yang menarik. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, hukum, dan budaya juga dapat memperkaya analisis, khususnya dalam memahami akar permasalahan politik uang dan potensi resistensinya dalam berbagai konteks.

Referensi

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASLA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 145–163. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). Title. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Nomor 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatia.press.com/hpjourals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Armstrong, J. A. (1973). *Class Inequality and Political Order: Social Stratification in Capitalist and Communist Societies*. By Frank Parkin. (New York: Praeger Publishers, 1971. Pp. 205. \$7.00.). *American Political Science Review*, 67(1), 272–273. <https://doi.org/DOI:10.2307/1958595>
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>
- Basri, H., & Si, M. (2020). DALAM PILKADES DI KABUPATEN SUMENEP (Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal) Oleh JURNAL SETIA

- PANCASILA Vol 1 No 1 Tahun 2020 JURNAL SETIA PANCASILA Vol 1 No 1 Tahun 2020. *JURNAL SETIA PANCASILA Vol, 1(1)*, 51–64.
- Deswinta, C. (n.d.). POLITIK TRANSAKSIONAL DI INDONESIA REFLEKSI PATRONASE TERHADAP PERILAKU MEMILIH DI INDONESIA. In *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN POLITIK UANG* (hal. 17–18).
- Fahriansyah, F. (2015). *Peran Da'i Dalam Membentuk Perilaku Resistensi Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Tabalong Tahun 2013*.
- Ferhi F. Putra, B. S. P. (2008). *ANARKISME SOSIAL DAN ORGANISASI*. Daun Malam.
- Hafrida, L., Nurhikmah, U. O., Nasiwan, N., Pahlevi, M. E. T., Amrurrobbi, A. A., & Satria, H. (2022). Penguatan Pendidikan Politik Di Kampung Anti Money Politics di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 449–457. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342%0Ahttps://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18502>
- Hajad, V. (2015). Politik Kiai Dan Resistensi Sosial Vellayati. *Jurnal Public Policy*, 1.
- Harper, E. B. (1968). Social consequences of an unsuccessful low caste movement. *Social mobility in the caste system in India*, 36–65.
- Kantaprawira, R. (2006). *SISTEM POLITIK INDONESIA : SUATU MODEL PENGANTAR*. Sinar Baru Algensindo.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Dunia Pustaka Jaya.
- Lestari, S., & Sunarso. (2021). Praktik politik uang (money politic) pada pemilihan Tepala Tesa Tawang Sari Kabupaten Karanganyar tahun 2019. *E-Journal Student E-CIVICS*, 10(05), 548–556.
- Linebaugh, P. (1976). Karl Marx, the theft of wood, and working class composition: A contribution to the current debate. *Crime and Social Justice*, 6, 5–16.
- Lucas, A. (1985). The tiga daerah affair: Social revolution or rebellion. *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution*, University of Hawaii Press, Honolulu, 23–53.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Moch Edward Trias Pahlevi, A. A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. www.annualreviews.org.
- Mustika, M., Sari, K., & Warsono, W. (2023). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Resistensi pemilih mahasiswa terhadap politik uang*. 9(1), 31–40.
- Nur Shadrina, S., & Crisna Wijaya, G. (2024). Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1588–1595. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8958>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611>
- Paige, J. M. (1988). *Revolution and the agrarian bourgeoisie in Nicaragua*.
- Panoff, M. (1970). Marcel Mauss's "The Gift" Revisited. *Man*, 5(1), 60–70.

- Putra, E. V. (2018). Money Politics Dalam Penyelengaran Pemilihan Umum Di Kota Pariaman. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.19>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Ramadhan, M. N., Daniel, J., & Oley, B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 169–180. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/379>
- Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 156–167. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1601>
- Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279–289.
- Scott, J. C. (1981). Moral ekonomi petani: Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. (No Title).
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani* (B. Kusworo (ed.); Pertama). Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah* (Edisi Pert). Yayasan Obor Indonesia.
- Taufik, I. B. I., Very Dwi Setiawan, & Rahmiati. (2017). Pendidikan Anti Korupsi dan Politik Uang. *Экономика Региона*, 32.
- Wahyuni, S., Riwanto, A., Achmad, & Firdaus, S. U. (2023). Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 9–20.
- Widjaja, H. (2008). *Otonomi desa : merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Raja Grafindo Persada.
- Zainal, W. Y., Nazar, J., Fitri Z, Y., & Irwan, I. (2021). Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis. *Integritas*, 7(1), 79–100. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.731>

Wawancara

NN. (2024). Warga Karanganyar, 6 November 2024.